Laju Vaksinasi Booster DIY Masih Lambat

YOGYA (KR) - Meski Pemda DIY terus berupaya menggencarkan vaksinasi booster (penguat) hasilnya belum sesuai dengan harapan. Karena berdasarkan data yang ada rata-rata cakupan vaksin booster di DIY selama sepekan terakhir hanya berada di angka 12 ribu dosis tiap harinya. Jumlah tersebut termasuk menurun jika dibandingkan dengan capain vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Menyikapi hal tersebut Pemda DIY terus mengimbau atau mengajak masyarakat untuk datang ke sentra vaksinasi di puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di DIY.

"Terus terang untuk capaian vaksinasi booster sampai saat ini masih perlu ditingkatkan. Karena untuk animo masyarakat datang ke sentra vaksin tidak seperti vaksin dosis pertama dan kedua. Apalagi pemerintah hanya mewajibkan masyarakat untuk menjalani vaksinasi hingga dosis kedua agar dapat beraktivitas di tempat publik. Jadi ada masyarakat yang kurang antusias mengikuti booster," kata Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIY, Sumadi, di Kompleks Kepatihan, Kamis (17/3).

Berdasarkan data yang ada cakupan vaksinasi booster di DIY berada di angka 13 persen. Artinya, dari 2.800.000 sasaran, baru 399 ribu orang yang menerima suntikan booster sejak program vaksinasi penguat dicanangkan pada pertengahan Januari 2022 lalu. **(Ria/Ira)-d**

PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

Bedah 10 Rumah Libatkan Pelaku Usaha

KR-Istimewa

Rumah Slamet, warga Plakaran, Moga, Pemalang setelah dibedah.

SEMARANG (KR) - Pelaku usaha dilibatkan Pemerintah dalam Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) untuk membiayai renovasi bedah 10 rumah keluarga tidak mampu di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Program kolaboratif Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jateng ini merupakan bentuk nyata atas Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang dilakukan Kemenko Perekonomian.

Kepala Disperindag Jateng Muhammad Arif Sambodo mengatakan, Kabupaten Pemalang merupakan satu dari lima kabupaten prioritas pelaksanaan Program PKE di Jateng. Program ini fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu seperti rumah layak huni, sarana air bersih, ketersediaan listrik, hingga sanitasi. Peran serta pelaku usaha melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) sangat diperlukan untuk membantu Pemerintah mempercepat penghapusan kemiskinan.

"Kami berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di Jateng agar turut serta dalam program ini. Salah satunya PT Djarum berpartisipasi dalam RSLH di Pemalang," ujarnya dalam serah terima RSLH di Kabupaten Pemalang, Kamis (17/3).

Keikutsertaan pelaku usaha dibutuhkan karena pada dasarnya Program PKE tidak bisa dibiayai secara keseluruhan oleh APBD Pemprov Jateng. Serah terima dari PT Djarum kepada 10 pemilik rumah dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Hepi Priyanto mewakili Bupati Pemalang, Deputi General Manager (GM) Corporate Communications PT Djarum Achmad Budiharto serta perwakilan kecamatan dan desa. Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. **(Trq)-f**

DIORAMA KEARSIPAN DAERAH

Memahami Perjalanan Sejarah DIY

KR-Devid Permana

Rembag Kaistimewan 'Diorama Kearsipan DIY, Menambah Khasanah Wawasan Istimewa'.

KEHADIRAN Diorama Kearsipan Daerah DIY merupakan bentuk dukungan dan kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengenalkan tentang perjalanan sejarah DIY kepada generasi milenial.

Dengan mengunjungi Diorama Kearsipan DIY, pengunjung akan dapat membayangkan, merasakan pengalaman yang mendekati aslinya, sehingga lebih mudah dalam memahami sejarah DIY. Diorama Kearsipan Daerah ini merupakan persembahan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dan didanai sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan (Danais).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Dra Monika Nur Lastiyani MM menuturkan, Pemda DIY memiliki banyak dokumen yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Arsip statis ini memiliki nilai guna tinggi yang didapatkan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY.

"Sangat disayangkan jika arsip-arsip bernilai guna tinggi ini informasinya tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat, sehingga munculah ide untuk membuat Diorama Kearsipan Daerah yang dikemas agar dapat merangkul generasi milenial," terang Monika dalam Rembag Kaistimewan bertema 'Diorama Kearsipan DIY, Menambah Khasanah Wawasan Istimewa'.

Rembag Kaistimewan ini menghadirkan narasumber lain, Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY) dan Pius Sigit Kuncoro (Tim Perencana Diorama Kearsipan) dipandu Wijil Rachmadani.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogya, Kamis (17/3) dan disiarkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan. Kegiatan ini didanai dengan Dana Keistimewaan.

Pius Sigit Kuncoro menambahkan, merancang diorama kearsipan marupakan hal yang baru, karena subjek yang dihadapi adalah arsip statis. Tantangannya adalah bagaimana membuat subjek (arsip statis) ini bisa berbicara ke publik, maka dibutuhkan satu penanganan khusus. "Kami berupaya agar arsip tersebut tidak hanya menyampaikan konten historisnya saja, tapi juga ada warna-warna tertentu dan suara zaman yang disampaikan oleh arsip itu," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Pius, tantangan lain yang dihadapi tim adalah bagaimana menghadirkan perjalanan sejarah DIY yang sangat panjang (ratusan tahun) ke dalam ruang yang sangat terbatas dalam waktu singkat, namun mudah dipahami audiens. Oleh karena itu sangat diperlukan kolaborasi antara para seniman dan sejarawan, sehingga antarruang diorama mampu memberikan pengalaman dan membangun emosi yang berbeda.

"Misalnya diorama kearsipan tentang gempa Yogya, di situ ada trauma yang dirasakan audiens, rasa kehilangan dan pemulihan (recovery), itu semua kita tampilkan dalam waktu sangat singkat hanya lima menit. Kami berkolaborasi dengan para animator dalam merekonstruksi peristiwa gempa besar itu," ujarnya.

Aris Eko Nugroho mengapresiasi kolaborasi dalam pembangunan diorama kearsipan daerah ini di mana semua pihak yang berkompeten, termasuk pihak pemenang lelang/tender juga berkolaborasi dengan para seniman dan sejarawan untuk menyamakan visi. "Semangat kolaborasi ini sangat menarik, dan bisa menjadi titik tolak untuk diterapkan di tempat lain di lingkup Pemda DIY," ujarnya.

Aris melihat, diorama kearsipan daerah ini akan menjadi destinasi wisata baru di Yogya, sekaligus media pembelajaran sejarah tentang Yogya. Apalagi antusiasme masyarakat (milenial) untuk berkunjung sangat tinggi, bahkan mereka rela mengantre. "Di Malioboro juga akan dibangun Jogja Planing Gallery yang memuat sejarah dan pengembangan DIY. Ini nanti akan saling melengkapi, sehingga menambah daya tarik wisatawan," katanya. **(Dev)**

PERLUAS ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI

Bank BPD DIY Siap 100 Persen Beri Dukungan Pemda

YOGYA (KR) - Kota Yogyakarta menempati peringkat terbaik dalam pencapaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) tahun 2021 secara nasional dengan nilai sebesar 99,2% atau berada di tahap digital. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran dan dukungan Bank BPD DIY supaya terus bersinergi dalam mengakselerasi dan memperluas digitalisasi transaksi Pemda.

KR-Istimewa

Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad mendampingi Wakil Walikota Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menerima piagam pencapaian indeks ETPD 2021 terbaik nasional yang diserahkan Kepala Perwakilan BI DIY Budiharto Setyawan.

Bank BPD DIY bersama Bank Indonesia (BI) DIY dan Pemkot Yogyakarta yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya digitalisasi di Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah ETPD baik di sisi pendapatan berupa pajak dan retribusi maupun belanja daerah.

Dalam setiap pelaksanaan ETPD tersebut, Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) melakukan monitoring dengan menghitung IETPD setiap triwulan. Dalam perhitungan IETPD dimaksud memperhatikan 3 aspek yaitu aspek implementasi, aspek realisasi dan aspek lingkungan strategis. Hasilnya, Pemkot Kota Yogyakarta mendapatkan IETP 99,2% sekaligus menempatkan Kota Yogyakarta sebagai Kota dengan peringkat satu di Nasional dari sisi IETPD.

"Bank BPD DIY sudah mengembangkan digitalisasi layanan transaksi keuangan baik untuk pengeluaran dan pendapatan seperti internet banking, mobile banking dan sebagainya sejak 2017 lalu. Langkah tersebut untuk mendukung implementasi transaksi non tunai Pemda. Terus berkembang hingga lahir produk Cash Management System (CMS) Bank BPD DIY pada 2018 yang diterapkan seluruh Pemda hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di level paling terbawah untuk transaksi pengeluaran dengan sistem internet banking," tutur Direktur Utama (Dirut) Bank BPD DIY Santoso Rohmad kepada KR, Senin (14/3).

Santoso menyampaikan dari sisi transaksi penerimaan baik berupa pajak dan retribusi, Bank BPD DIY mendukung layanan non tunainya dengan membuat saluran-saluran digital. Saluran tersebut baik berupa penyediaan kanal pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bank BPD DIY, lalu kerjasama dengan Fintech dan sebagainya. Bank BPD DIY pun mengadakan High Level Meeting TP2DD Kota Yogyakarta sekaligus peluncuran piloting QRIS Parkir di 4 titik dan Kick-Off QRIS ASN sebagai role model transaksi QRIS.

Selain itu, dalam memacu implementasi ETPD di daerah, Pemerintah Pusat kembali menggelar Championship antar Pemda di skala Nasional pada 2022 ini. Untuk itu, Bank BPD DIY siap 100 % mendukung seluruh Pemda di DIY agar mencapai IETPD terbaik hingga 100% nantinya. Guna mempertahankan capaian yang telah diraih pada 2021, Bank BPD akan lebih mendukung Pemkot Yogyakarta maupun Pemkab se-DIY dan Pemda DIY. Selanjutnya, Bank BPD DIY bertugas meningkatkan edukasi transaksi non tunai kepada masyarakat karena salurannya sudah banyak.

"Kita melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengalihkan transaksi keuangan secara digital. Itu konsep yang tengah kita jalankan. Jika Pemkot Yogyakarta sudah mencapai IETPD 99,2% tahun lalu, maka harus bisa 100% tahun ini. Pokoknya Bank BPD siap 100 %, tidak hanya Pemkot tetapi Pemkab di DIY semuanya sudah di tahap digital," tegas Santoso.

Asisten Perekonomian Pemkot Yogyakarta Kadri Renggono menjelaskan berbagai perluasan implementasi transaksi digital tersebut antara lain laporan pajak daerah yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi pembayaran bisa dengan mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor kas atau teller. Pemkot Yogyakarta menggunakan metode CMS Bank BPD DIY sehingga tanpa perlu datang ke bank bisa langsung bayar berbagai pajak.

Selanjutnya, sinergi Pemkot Yogyakarta dan Bank BPD DIY bisa terlihat dari pembayaran retribusi dan sudah menyiapkan QRIS Bank BPD DIY di hampir seluruh Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun di Rumah Sakit (RS) milik Pemkot Yogyakarta seperti di RSUD Wirosaban. Kemudian retribusi sampah dan ujicoba retribusi parkir menggunakan QRIS Bank BPD DIY di dua lokasi parkir yaitu parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Jl. Prof Yohanes dan Tempat Parkir Khusus (TKP) Limaran.

"Harapan kami ini juga bisa mendorong pelaku ekonomi kecil terutama UMKM skala mikro mulai memanfaatkan fasilitas transaksi non tunai. Itu relatif efisien dan memudahkan mereka mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan apabila butuh modal," pungkasnya. **(Ira)**